



Buletin Parlementaria

Nomor 1081/I/XII/2019 • Desember 2019



DPR Optimis Sirkuit Mandalika Selesai Sesuai Target



9 772614 339005



4 Puan Maharani:
Guru Ujung Tombak
Pembangunan SDM



18 Potensi Obyek Wisata
Likupang Sangat
Menjanjikan



Tim Kunspek Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meninjau progres pembangunan Sirkuit Mandalika. Foto: Naefuroj/HR

DPR Optimis Sirkuit Mandalika Selesai Sesuai Target

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda optimis pembangunan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk gelaran MotoGP pada tahun 2021 bakal selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Pasalnya, progress pembangunan sirkuit ini cukup signifikan.

Hal tersebut diungkapkan Syaiful usai meninjau langsung kawasan Kuta

Mandalika dan menggelar pertemuan dengan Direksi PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan jajarannya didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB serta para *stakeholder* di Kuta Mandalika, NTB, Jumat (22/11).

“Ada progres yang cukup menggembirakan dalam pembangunan kawasan Mandalika sebagai destinasi wisata superprioritas sekaligus lokasi sirkuit MotoGP 2021 mendatang. Mandalika saat ini bahkan sudah

masuk dalam lima besar destinasi wisata superprioritas yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” jelas Syaiful.

Politisi PKB ini meyakini perhelatan MotoGP 2021 hampir bisa dipastikan akan berjalan sesuai dengan *time schedule* yang sudah disepakati. Semua *stakeholder* akan bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jalan *bypass* dari Bandara ke Mandalika sebagai salah satu jalan

akses khusus untuk memudahkan pengangkutan peralatan pendukung MotoGP 2021.

“Nanti Kementerian PUPR akan mempercepat proses pembangunan jalan *bypass* yang rutenya lebih lurus sebagai salah satu akses dari Bandara Lombok menuju Sirkuit Mandalika. Ini untuk memudahkan pengangkutan truk-truk trailer yang membawa peralatan pendukung MotoGP 2021,” imbuh Syaiful.

Komisi X DPR RI juga memperoleh informasi dari Kepala Dinas Pariwisata NTB bahwa masyarakat juga sudah siap untuk menjadikan Mandalika sebagai destinasi wisata superprioritas lima besar. Seluruh



...PROGRES YANG CUKUP MENGGEMBIRAKAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN MANDALIKA SEBAGAI DESTINASI WISATA SUPERPRIORITAS SEKALIGUS LOKASI SIRKUIT MOTOGP 2021 MENDATANG

desa penyangga akan didorong menjadi desa wisata. Selain di kawasan Mandalika sebagai pusat kegiatan MotoGP, nanti para pengunjung dan wisatawan juga bisa mengunjungi *spot-spot* desa wisata di sekitar Mandalika.

“Prinsipnya konsep wisata Mandalika harus melibatkan masyarakat sekitar. Kita berharap masyarakat diberi ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi menjadi bagian dari suksesnya gelaran MotoGP 2021 nanti,” tandas legislator dapil Jawa Barat VII ni.

Syaiful menambahkan, *skill* masyarakat setempat untuk menjadi *tour guide* (pemandu wisata), serta kemampuan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Arab harus difasilitasi secara maksimal sejak sekarang. Pihaknya menyambut baik pelatihan oleh ITDC dan Dinas Pariwisata NTB dan perlu ditingkatkan.

“Melalui kerja sama yang baik antara ITDC, Pemkab dan Pemprov serta para *stakeholder* di sini akan kita dorong terus, juga dari Kementerian Pariwisata untuk terlibat aktif membuat *event-event* yang bisa semakin mem-branding Mandalika sebelum pelaksanaan MotoGP 2021,” pungkash Syaiful.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer merasa optimis Sirkuit Mandalika yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan MotoGP 2021 akan selesai tepat waktunya. Dukungan dari berbagai pihak membuat dirinya yakin pengerjaan Sirkuit Mandalika bakal selesai tepat waktu, meski sempat ada kabar pembangunan Sirkuit Mandalika masih meninggalkan berbagai masalah yaitu pembebasan lahan.

Soal target pengerjaan, Abdulbar mengatakan Sirkuit Mandalika yang kini masih 30 persen, bisa rampung di akhir 2020. “Kami sedang mengejar pembangunan Sirkuit Mandalika. Kemungkinan baru akan selesai akhir 2020. Penentuan jadwal untuk musim 2021 juga baru akan ditentukan sekitar Agustus 2020,” tutup Abdulbar.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Maria Lestari, Andreas Hugo Pareira, Puti Guntur Soekarno, Adrianus Asia Sidot, Djohar Arifin Husin, Eva Stevanny Rataba, Rian Firmansyah, Andi Muawiyah Ramli, Muhammad Kadafi, Bramantyo Suwondo, Fahmi Alaydrus, Mustafa Kamal, Abdul Hakim Bafagih dan Rojih. ■ oji/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra
SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Annanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,
Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E., Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Puan Maharani: Guru Ujung Tombak Pembangunan SDM

Profesi guru benar-benar jadi tumpuan untuk menyukseskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sedang gencar dikampanyekan Pemerintah. Untuk itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai penting meningkatkan kesejahteraan guru, kapasitas, dan kompetensinya. Profesi guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa “Guru adalah pondasi pembangunan SDM. Karena itu, Pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas dan kompetensinya,” kata Puan dalam rilis yang diterima **Parlementaria** untuk menyambut Hari Guru, Senin (25/11). Tak lupa, ia menyampaikan ucapan selamat kepada para guru di seluruh wilayah Indonesia.

Beban guru selama ini, sambung legislator F-PDI Perjuangan itu, belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan hidupnya. Masih banyak ditemui para guru di daerah berjuang dengan penghasilan minim dan status honorer. Ia menyerukan agar Pemerintah segera mengangkat para guru honorer yang dinyatakan lulus tes pada Februari 2019 sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Masalah ini sudah pernah dibahas dalam Raker Komisi II. Mereka sudah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menangani persoalan ini,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V itu. Sejauh ini,

BKN juga masih terkendala dengan regulasi. Sedangkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai pembuat regulasi belum mengeluarkan keputusan tersebut.

Di sisi lain, Puan mengimbau Pemerintah meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru. Peningkatan kemampuan guru penting agar kemampuan siswa sejajar dengan negara-negara lain. Apalagi, anggaran pendidikan di

Indonesia dan negara-negara ASEAN sudah sama. Vietnam, misalnya, 20 persen dari APBN-nya. Tapi skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) kalah jauh, terutama soal literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains yang diperuntukkan bagi siswa berusia 15 tahun.

Puan berharap, para guru mengembangkan sistem belajar yang kreatif dan interaktif untuk meningkatkan literasi membaca, kemampuan matematika dan sains para siswa. Salah satunya dengan mengajak para siswa aktif berdiskusi. Metode pembelajaran dengan mengajak para siswa berdiskusi, ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini, pernah diterapkan Bung Karno ketika mengajar sebagai guru sejarah dan ilmu pasti di Yayasan Ksatrian milik Dr. Setiabudi alias Douwes Deker di Bandung. ■ mh/sf

Ketua DPR RI Puan Maharani.
Foto: Kresno/HR



DPR Bahas Rencana Kerja Sama Indonesia-Selandia Baru



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Azis Syamsuddin didampingi sejumlah Anggota DPR RI menerima kunjungan Parlemen Selandia Baru. Foto: Arief/HR

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menerima kunjungan Parlemen Selandia Baru. Sejumlah rencana kerja sama turut dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya kerja sama dalam sektor pendidikan, pariwisata, budaya, bahasa, kesenian, hingga olahraga.

“Mereka menawarkan kerja sama dan kami akan salurkan kepada beberapa Komisi dan Instansi, untuk meningkatkan kultur budaya, bahasa, kesenian dan juga sport untuk dimasa yang akan datang. Kami menyambut baik, mudah-mudahan ini bisa mempererat hubungan dan bisa menumbuhkan nilai ekonomi, trading dari ekspor impor dari neraca perdagangan menuju ke arah yang

positif,” kata Azis usai menerima kunjungan delegasi Parlemen Selandia Baru, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Hubungan Indonesia dengan Negeri Kiwi ini, sudah terjalin dengan baik dari sektor pariwisata. Setidaknya, tren kunjungan wisatawan Selandia Baru meningkat 20,03 persen dari tahun sebelumnya dengan total 128.324 orang sepanjang 2018 lalu. Azis mengatakan bahwa sejumlah lokasi wisata andalan juga turut disampaikan, seperti Bali, Lombok, hingga Danau Toba di Sumatera Utara. “Parlemen New Zealand juga memberikan tempat seperti Auckland, dan pulau-pulau yang ada di sana,” tambahnya.

Tidak hanya sektor pariwisata, imbuh politisi Partai Golkar itu, kerja sama pendidikan juga menjadi bahasan

utama. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengatakan bahwa ada 1.200 pelajar asal Indonesia yang menimba ilmu di Selandia Baru. Mendukung hal tersebut, Azis menyatakan bahwa kerja sama pendidikan perlu dilakukan, apalagi Selandia Baru terkenal dengan sekolah pilot (International Aviation Academy) terbaik sedunia.

“Mereka (Selandia Baru) mengajak kerja sama dalam hal pendidikan yaitu sekolah pilot atau *aviation academy*, kemudian kerja sama dalam bentuk *culture* dan bentuk perfilman, mengingat teknologi perfilman di New Zealand itu sangat pesat, dan beberapa film yang mendominasi kompetisi perfilman dunia salah satunya dibuat di New Zealand,” kata mantan Ketua Komisi III DPR RI ini. ■ alw/sf

Komisi I Dorong Sritex Terus Kembangkan Teknologi Pertahanan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mengapresiasi prestasi PT. Sri Rejeki Isman Tbk (PT. Sritex)

sebagai salah satu industri komponen utama dalam memenuhi kebutuhan perbekalan para personel TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari terus mendorong PT. Sritex terus meningkatkan pengembangan teknologi dan produk pertahanan nasional.

“Sejauh ini (kinerja PT. Sritex) sungguh membanggakan sekali, karena ini adalah industri yang sudah diakui dunia,” ujar Kharis saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Direktur Utama PT. Sritex (Persero) beserta jajaran, di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (21/11). Dalam pertemuan itu, dipaparkan sejumlah kinerja PT. Sritex dalam mendukung perbekalan TNI.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendapat informasi bahwa setidaknya sudah ada 30 negara yang sudah menggunakan produk PT. Sritex yang berstandar NATO untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan tentaranya. Sehingga, TNI juga menggunakan perbekalan yang sudah berstandar NATO. Ia berharap produk yang dihasilkan PT. Sritex terus dikembangkan, sehingga tidak ketinggalan zaman.

Selain itu, Kharis menilai kemajuan industri PT. Sritex yang telah diakui dunia ini sekaligus mengurangi kebutuhan impor negara akan perlengkapan TNI. Menurutnya PT. Sritex sudah bisa menjadi contoh perusahaan lainnya. Pasalnya PT. Sritex juga telah mengeksplor produk



Tim Kunspek Komisi I DPR RI meninjau proses produk PT. Sri Rejeki Isman Tbk (PT. Sritex). Foto: Dipo/HR

Indonesia untuk dipakai negara lain.

“Kita memiliki SDM yang berkualitas, terampil dan mau berkembang, jadi buat apa impor barang jika bisa diproduksi sendiri. Kita tidak khawatir karena kualitasnya sudah diakui dunia. Jadi perlu kita dukung dan pantau terus, supaya industrinya semakin bersinergi dan berjaya untuk kebaikan bangsa Indonesia,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. Sritex Iwan S Lukminto menjelaskan bahwa kebutuhan perbekalan TNI tidak bisa diproduksi secara sembarangan, sehingga dibutuhkan riset yang serius untuk mendapatkan produk yang berkualitas. PT. Sritex juga terus

berupaya meningkatkan kualitas untuk bisa bersaing dengan produsen dari negara lain. Upaya memperkuat pasar dalam negeri dan luar negeri dilakukan PT. Sritex dengan membangun industri tekstil terpadu mulai dari hulu ke hilir.

“Salah satu strategi jangka panjang PT. Sritex adalah memastikan tersedianya serat rayon berkualitas tinggi sebagai bahan baku penting dalam proses produksi. Kita sudah membangun pabrik rayon yang menghasilkan bahan baku benang. Fasilitas produksi rayon ini mempunyai kapasitas total mencapai 80 ribu ton per tahun. Hal ini yang menjadi keunggulan kami dalam memproduksi kebutuhan perbekalan TNI,” tutur Iwan. ■ dip/sf

PT. INTI Diharapkan jadi Industri Strategis Bagi Kepentingan Pertahanan

Komisi I DPR RI mendukung program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan, yang mendukung kemampuan Komando Kendali Komunikasi Komputer Intelijen Pengamatan Pengintaian dan Pengenalan (K4IP) bagi TNI. Untuk keperluan inilah, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Persero menjadi industri yang strategis yang patut untuk terus dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan dalam sambutannya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI dengan Direktur Utama PT. INTI beserta jajaran, di Kantor Pusat PT. INTI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/11).

"Keterlibatan PT. INTI dalam pemenuhan alat peralatan pertahanan sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Dalam UU ini, PT. INTI merupakan salah satu dari industri komponen utama/ penunjang dalam mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alat Peralatan Pertahanan," jelas politisi daerah pemilihan Jawa Barat I itu.

Untuk itu Nico menegaskan, Komisi I DPR RI bersama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI terus melakukan kajian dan pendalaman terhadap pengadaan alutsista yang diajukan Kementerian Pertahanan dan TNI pada tiap tahapan pembahasan anggaran.

"Hasil yang ingin dicapai melalui

mekanisme pendalaman ini adalah keselarasan dan kecermatan dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista dengan program modernisasi Alutsista pada setiap tahap *Minimum Essential Force* (MEF)," imbuh politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. INTI Otong lip menuturkan sejak berkembangnya tren konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi (IT), PT. INTI telah melakukan perubahan orientasi bisnis dari yang semula berbasis *pure manufacture* menjadi sebuah industri yang berbasis solusi kesisteman, khususnya dalam bidang sistem infokom dan integrasi teknologi.

INTI menangani solusi dan layanan jaringan tetap maupun seluler serta mengembangkan produk-produk seperti IP PBX, *Network Management System* (NMS), *Subscriber Line*

Maintenance System (SLIMS), NGN Server, *Video Messaging System* (VMS), Perangkat Pemantau dan Pengontrol berbasis SNMP (GPA), *Interface Monitoring System* untuk jaringan CDMA, dan *Disaster Forecasting and Warning System* (Sistem Deteksi dan Peringatan Bencana Alam).

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI turut diikuti oleh Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Bobby Adhityo Rizaldi, Ilham Pangestu, Bambang Heri Purnama, Yan Permenas Mandenas, Fadli Zon, Muhammad Farhan, dan Al Muzzammil Yusuf. ■ tra/es

Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan.
Foto: Tiara/HR



Komisi II Pantau Persiapan Pilkada Kalteng

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 akan diikuti sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Guna memantau persiapan Pilkada Serentak 2020 tersebut, Komisi II DPR RI mendatangi Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kita datang ke Kalimantan Tengah untuk melihat dan mendengar langsung persiapan dan kesiapan menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, yakni Pilkada Gubernur maupun juga Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur. Kita ingin mendengarkan secara langsung penjelasan isu-isu dan kesiapan serta persoalan-persoalan apa yang mereka hadapi terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan datang,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, saat memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Palangka Raya, Kalteng, Kamis (21/11).

Saan menambahkan, terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kalteng, memang ada persoalan terkait dengan KTP-elektronik yang semua daerah mengalami persoalan ini. “Dari hampir semua kunjungan kita ke daerah, KTP-elektronik ini menjadi persoalan. Mungkin ke depan menjadi catatan bagi Kementerian Dalam Negeri, karena soal blanko KTP-elektronik terpusat di Kemendagri dan ini menjadi kendala daerah, karena banyak kendala permintaan dari masyarakat namun blanko terbatas,” ujar Saan.

Apalagi, tambah politisi F-NasDem



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Singgih/HR

ini, KTP-el menjadi salah satu komponen yang dijadikan syarat untuk mengikuti Pemilu. “Karena kalau terkait dengan surat keterangan atau suket kadang juga menjadi persoalan, karena tidak semua TPS menerima suket, hal-hal seperti ini juga yang perlu nanti disampaikan ke Kemendagri terkait dengan pemenuhan KTP-elektronik, karena ini akan menjadi persoalan serius terkait dengan DPT ke depan,” ujarnya.

Legislator dapil Jawa Barat VII ini juga menyoroti terkait dengan panitia *ad hoc* seperti PPK, PPS baik KPU maupun Bawaslu dalam tahap sedang persiapan, sudah berproses untuk memenuhi itu semua. “Memang ada persoalan terkait dengan persyaratan terutama untuk pengawas TPS. Pengawas TPS yang disyaratkan di Bawaslu terutama pendidikan minimal SMA dan berusia 25 tahun minimal,” jelas Saan.

“Tidak semua hal-hal tersebut di daerah bisa terpenuhi. Dan kalau

hal-hal seperti itu tidak diselesaikan, nanti pengawas-pengawas di daerah dianggap melanggar peraturan tersebut. Ini juga harus kita carikan jalan keluar. Kalau misalnya mereka tidak bisa memenuhi sesuai dengan yang ditentukan minimal SLTA, dan yang kedua minimal 25 tahun, masalahnya tidak semua di TPS ada lulusan SLTA. Kalaupun ada, belum tentu dia mau jadi pengawas,” jelasnya.

Saan memastikan akan meminta Kemendagri untuk bisa berusaha semaksimal mungkin dalam persiapan Pilkada serentak 2020, terutama KTP-el bisa dipenuhi. Menurutnya, jika pada akhirnya penyelesaian KTP-el belum juga bisa memenuhi 100 persen, harus menjadi komitmen bersama bahwa suket bisa menjadi tanda atau identitas yang bisa diterima oleh semua. “Jadi itu harus menjadi komitmen bersama bahwa tidak ada satupun nanti TPS yang menolak mereka yang membawa suket ketika ke tempat pemilihan,” tegasnya. ■ skr/sf

Jelang Pilkada Serentak, Masih Ada Permasalahan KTP-el

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhamad Arwani Thomafi menyangkan masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 mendatang. Padahal seharusnya persoalan tersebut seharusnya sudah selesai pada 2018 lalu.

“Persoalan-persoalan (KTP-el) seperti ini harus segera dituntaskan, jangan berlarut-larut,” tegas Arwani saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsppek) Komisi II DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11/2019). Kunsppek ini dimaksudkan untuk mengetahui

kesiapan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari anggaran tahapan pendaftaran, netralitas aparatur sipil negara (ASN), partisipasi masyarakat, dan berbagai permasalahan lain yang perlu diantisipasi.

Pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT), lanjutnya, juga masih mengalami persoalan. Sebab, berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) 99 persen penduduk Indonesia telah memiliki KTP-el. “Tetapi, masih ada satu persen penduduk Indonesia yang masih belum memiliki KTP elektronik. Apakah mereka yang tidak memiliki KTP elektronik bisa mencoblos atau tidak,” sebutnya.

Catatan berikutnya yang dikemukakan Arwani adalah soal partisipasi pemilih. Di mana pada Pemilu Serentak 2019 lalu, angka partisipasi pemilih di atas 81 persen.

Tantangannya, apakah partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 bisa melebihi angka tersebut. “Apakah Sumbar yang tahun depan (2020) akan melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan ada 13 pilkada tingkat kabupaten kota partisipasinya bisa melebihi 81 persen?” ucapnya.

Terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar pelaksanaan Pilkada 2020, politisi Fraksi PPP menanyakan apakah telah tersedia. Karena di Sumatra Barat sendiri tingkat provinsi, kabupaten dan kotanya sudah melakukan penandatanganan NPHD.

“Kemudian terkait permasalahan logistik pemilihan. Saya berharap masalah logistik ini tidak terjadi dalam proses pilkada, meski masalah itu terjadi saat pemilu 2019, saat itu masih banyak daerah yang surat suaranya telat datang ke TPS,” ujar legislator dapil Jawa Tengah III itu.

Isu lainnya masih berkembang terkait netralitas TNI, Polri dan ASN yang akan menjadi calon kepala daerah, persoalan politik uang, hoaks, dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang kerap terjadi saat pemilu. “Terakhir bagaimana regulasi yang telah kita miliki dapat mendukung proses pengawasan Pilkada 2020,” harapnya.

Sejumlah langkah pengawasan terus dilakukan Komisi II DPR RI. Arwani Thomafi meminta para gubernur bersinergi dengan unsur TNI dan Polri guna memetakan daerah-daerah rawan konflik, selain itu, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan akurasi DPT.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhamad Arwani Thomafi.
Foto: Andri/HR



man/es

Komisi II Cek Kesiapan Pilkada Bali

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI menuju Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam rangka meninjau langsung kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

”

KERAWANAN MEMANG ADA, TAPI BERDASARKAN PENGALAMAN DI BALI INI AMAN-AMAN SAJA. TENTU SAYA HARAPKAN NANTINYA (PILKADA 2020) JUGA BERJALAN SEPERTI ITU

“Tujuannya untuk mengecek kesiapan baik dari Pemerintah Kabupaten hingga KPUD dan Bawaslu tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Bali. Karena Pilkada di Bali akan diselenggarakan di 5 Kabupaten dan 1 Kota, salah satunya Badung,” imbuh Arif saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait, di Kantor Bupati Badung, Bali, Kamis (21/11).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyampaikan pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa

wilayah di Bali harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersifat transparan, sehingga diharapkan tidak ada kecurangan yang terjadi.

“Beberapa sumber menyampaikan ada beberapa Kabupaten yang calon tunggal, menurut saya itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah jika hanya tunggal, tetapi yang menang bukan calon tersebut, itu baru masalah. Itu sebabnya perlu belajar dari pengalaman,” pesan legislator dapil Jawa Timur IV itu.

Lebih lanjut Arif mengapresiasi pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Bali yang telah digelar sebelumnya, dan berjalan aman dan tertib, sehingga harus tetap dicontoh untuk pelaksanaan selanjutnya. “Kerawanan memang ada, tapi berdasarkan pengalaman di Bali ini aman-aman saja. Tentu saya harapkan nantinya (Pilkada 2020) juga berjalan seperti itu,” harap Arif.

■ tn/sf

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo. Foto: Taufan/HR



Komisi IV akan Bantu Penanganan Wabah Hog Cholera di Sumut

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dengan tegas memastikan Komisi IV DPR RI akan membantu permasalahan wabah babi Hog Cholera di wilayah Provinsi Sumatera Utara agar segera teratasi dengan cepat, sehingga tidak menyebar ke daerah yang belum terinfeksi wabah. Tercatat sejak bulan September-November 2019, kematian babi di Sumut mencapai 10.298 ekor babi akibat wabah kolera.

Hal itu disampaikan Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kementerian Pertanian yang diwakili Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (22/11).

“Kita memberikan dukungan penuh kepada Gubernur untuk mengatasi masalah ini. Jika persoalan ini memerlukan anggaran untuk menyelesaikan, kita bisa realokasi anggaran dan kami akan bantu. Kita tidak ingin masalah ini semakin besar dan semakin lama. Saya ingin cepat terselesaikan,” tegas Sudin.

Politisi PDI-Perjuangan itu melanjutkan, saat ini masih ada dua juta ekor babi yang belum terinfeksi virus mematikan ini. Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Sumut bisa menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Jangan sampai permasalahan ini berdampak ke daerah lain di sekitar Sumut.

“Saya harapkan masukan-masukan



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Runi/HR

saya dapat diterima (Pemprov Sumut), segera dibuat surat kepada Kementerian Pertanian agar kasus kematian ternak babi di Sumut merupakan suatu wabah. Sehingga dana yang diperlukan untuk menangani wabah tersebut bisa dicairkan dan segera digunakan dari dana khusus,” pesan legislator dapil Lampung itu.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menjelaskan bahwa kematian babi yang terjadi di Sumut saat ini disebabkan oleh virus *hog cholera* dan indikasi virus ASF. Pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan terhadap kematian babi di 14 kabupaten agar virus tidak menyebar ke wilayah-wilayah lain.

“Kami telah menginstruksikan para bupati dan dinas terkait agar membantu para peternak babi dalam menangani babi yang sakit atau mati dan memastikan babi-babi tersebut tidak terjadi pergerakan ke luar wilayah tersebut. Kita sedang mensosialisasikan kepada peternak babi agar memberikan bangkai babinya kepada tim yang dibentuk di tiap-tiap kecamatan yang mayoritas masyarakatnya memelihara babi. Selanjutnya bangkai tersebut akan dimusnahkan,” jelas Edy.

Turut hadir Kasdam I/BB Untung Budiharto, Kepala BPBD Provinsi Sumut Riadil Lubis, Kepala Balai Karantina RI Ali Jamil Harahap, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap serta OPD terkait. ■ rmi/sf

Komisi V Perjuangkan Aksesibilitas Bali

Aksesibilitas jalan adalah hal yang utama dalam hal peningkatan sumber daya ekonomi di Bali.

Terlebih Bali adalah penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata sehingga keberadaan jalan yang layak adalah keharusan. Untuk itu, Komisi V DPR RI memperjuangkan percepatan pengerjaan jalan pintas (*shortcut*) ruas Mengwitani-Singaraja pada titik 3 dan 4 di Bedugul yang kini masih tahap pembangunan.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus pada kesempatan memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau ruas jalan tersebut, guna

mengetahui progres pengerjaan yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini, mempertanyakan tahapan-tahapan pengerjaan dengan detail *shortcut* titik 4 yang sudah dilalui dari awal hingga saat ini. Ia mendukung hasil pengerjaan dan optimis pengerjaan selesai tepat waktu.

“Hasilnya bagus. Satu yang perlu diingat, setelah pengerjaan selesai saya harap kondisi pinggir danau bisa ditata ulang agar lebih baik, juga material sisa pembangunan agar dibersihkan. Pada prinsipnya Komisi V mendukung pembangunan ruas jalan ini karena bermanfaat dalam meningkatkan potensi ekonomi di Bali,” tutur Lasarus,

di Bali, Kamis, (21/11). Aksesibilitas jalan akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI untuk Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster yang turut hadir dalam kunjungan ini menaruh harapan besar pada Komisi V DPR RI agar mampu memberikan dukungan. Ia menyampaikan harapannya agar pengerjaan *shortcut* itu bisa selesai tepat waktu. Mengingat proyek ini sangat penting guna mengurai kemacetan yang sering kali terjadi saat musim liburan maupun akhir pekan. Realisasi fisik titik 4 pertanggal 17 November mencapai 85,11 persen dan realisasi keuangan mencapai 71,16 persen. ■ hs/sf



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan Gubernur Bali I Wayan Koster melihat *masterplan* ruas jalan Mengwitani-Singaraja. Foto: Istimewa/HR

Komisi V Minta Penambahan Pintu Keluar Tol Lampung-Sumsel

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Utama Karya untuk menambah pintu keluar pada jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Di mana tol tersebut merupakan yang terpanjang di Indonesia.

“Kami dari Komisi V DPR RI menginginkan dalam setiap pembangunan jalan tol bisa menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di setiap daerah, sehingga setiap

perencanaannya, Pemerintah Daerah harus ikut terlibat dalam menentukan titik pintu keluar tol. Pintu tersebut harus menuju daerah industri, perkebunan, tempat wisata dan tempat yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat,” tutur Nurhayati.

Legislator dapil Jawa Barat XI itu menginginkan setiap daerah tidak hanya menjadi penonton di setiap pembangunan, melainkan harus ikut andil dan mendapatkan manfaat dari setiap pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Joko

Widodo saat pidato pelantikan presiden. “Saat Presiden Joko Widodo dilantik beliau menginginkan *delivered* tidak

”

PINTU TERSEBUT HARUS MENUJU DAERAH INDUSTRI, PERKEBUNAN, TEMPAT WISATA DAN TEMPAT YANG BISA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

hanya *sent*, yang artinya setiap pembangunan tepat diterima manfaatnya oleh masyarakat,” tutur politisi Fraksi PPP ini.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi meminta dalam setiap pembangunan infrastruktur harus efektif, efisien, tepat sasaran dan terpenting adalah memiliki nilai tambah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Infrastruktur ini dibangun untuk siapa? jika dibangun untuk masyarakat, ya harus memiliki manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai tol ini sepi peminat dan malah memutus UMKM karena terlewat ketika tol sudah dibangun,” tutur Mulyadi.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga meminta pemerintah daerah harus diajak dan memberikan masukan ke pemerintah pusat, karena yang tahu potensi daerah itu sendiri. “Pemerintah daerah harus pro aktif dan memberikan masukan dalam setiap pembangunan infrastruktur, sehingga ketika sudah dibangun rakyat ikut merasakan manfaatnya,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati.
Foto: Chasbi/HR



rh/es

Komisi V Dorong Pembangunan Sistem Air Bersih di Kubu Raya

Komisi V DPR RI mendorong agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pasalnya, sampai saat ini ketersediaan air bersih untuk pemukiman masyarakat masih sangat minim, tidak lebih dari 20 persen. Mengingat, kabupaten ini adalah hasil pemekaran yang APBD-nya terbatas.

“Kalau kita lihat, penyediaan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Kubu Raya belum sampai 20 persen, tentu ini perlu bantuan dari Pemerintah Pusat. Dan harus menjadi perhatian kita bersama, apalagi kabupaten ini adalah tetangga dari Ibu Kota Provinsi yang baru,” ujar Syarif Abdullah Alkadrie saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI dengan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan beserta jajaran di Kantor Bupati Kubu Raya, Kalbar, Kamis (21/11).

Selain itu, menurut politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, Kabupaten Kubu Raya yang juga dikenal sebagai daerah lumbung pangan, terutama di bidang pertanian. Tentu harus didorong dengan pembangunan irigasi, karena sampai saat ini dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya cukup kewalahan.

“Apalagi menurut saya, dengan adanya revisi peraturan berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat yang hanya boleh membangun irigasi di atas 3000 hektar, setelah direvisi nantinya diharapkan pemerintah pusat bisa membangun irigasi di bawah luasan itu. Tentu ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Kubu Raya, yang memang luasan wilayahnya rata-rata di bawah 3000 hektar,” jelas legislator dapil Kalbar ini.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, pertahunnya terdapat sekitar 3000 pembangunan perumahan dan pemukiman di Kubu Raya. Peningkatan ini sangat massif, dikarenakan memang daerah Kubu Raya memang jadi area *hinterland*.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah memulai dengan pembangunan sistem air bersih, karena menyangkut pelayanan dasar yang sangat penting. Di mana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saat ini hanya mampu menangani 22 ribu rumah, padahal dengan percepatan pembangunan perumahan dan pemukiman seperti saat ini, setidaknya PDAM harus bisa menyediakan sarana air bersih 60

sampai 70 ribu rumah.

“Untuk itu kami menyampaikan pentingnya hal ini, mengingat perkembangan yang begitu cepat di Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah penyangga, karena air bersih ini kebutuhan yang sangat mendasar,” terang Mahendrawan.

Mahendrawan menambahkan, pihaknya sudah membuat kajian untuk pengembangan pipa air, karena sumber air baku di Sungai Kapuas pada saat kemarau mengalami intrusi yang mengakibatkan air untuk konsumsi masyarakat menjadi asin.

“Untuk itu kami membuat rencana pengembangan air bersih di Sungai Kapuas yang mengarah lebih ke timur. Di sana air asin tidak masuk, jalurnya lebih baik dan arusnya lebih deras. Ini bisa menyuplai air bersih sekaligus untuk Kota Pontianak,” tutupnya. ■ jk/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke Kalbar. Foto: Jaka/HR

BAKN Dorong Pemprov Aceh Optimalkan Dana Otsus

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Marwan Cik Asan mendorong

Pemerintah Aceh untuk lebih optimal menggunakan dana otonomi khusus (Otsus) sebagai salah satu upaya menjadikan Aceh setara dengan provinsi lainnya. Terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, agar pada tahun 2020 mendatang angka kemiskinan bisa menjadi satu digit atau berada di bawah 10 persen.

“Tahun 2020 itu artinya, angka kemiskinan nasional itu sudah *single digit*, sudah di bawah 10 persen. Itu artinya bagaimana supaya pembangunan di Aceh lebih terarah, sumber dananya lebih jelas dan Aceh bisa berakselerasi secara cepat, supaya bisa sama dengan provinsi-provinsi lain di luar Aceh,” katanya usai memimpin pertemuan BAKN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah, di Kantor Gubernur Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (20/11).

Menurut Marwan, kemajuan infrastruktur yang ada saat ini di Provinsi Aceh tidak terlepas dengan adanya dana otsus selama 11 tahun terakhir yang besarnya sudah mencapai Rp 81 triliun. Dari dana otsus tersebut, 51 persennya menjadi sumber dana untuk menggerakkan pembangunan dan juga perekonomian di Aceh.

Marwan mengapresiasi kebijakan tersebut, karena setidaknya dengan dana Otsus tersebut, mampu membangkitkan perekonomian masyarakat Aceh seperti pada tahun 2000. Berbagai tempaan konflik dan bencana alam yang pernah terjadi di Aceh dan saat ini tingkat kemiskinan menurun kembali lagi ke jadi 15,32 persen seperti tahun 2000 lalu.



Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan. Foto: Nadya/HR

“Sebagai bagian utuh dari NKRI, Aceh tidak boleh ada di posisi tahun 2000, di mana ketimpangan dan kemiskinan menjadi sumber disintegritas bangsa. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran kita bersama adalah, bagaimana dana otsus yang tahun 2023 ini nanti akan turun menjadi 1 persen, kemudian tahun 2027 ini akan habis, ini apa solusinya? Karena 51 persen sumber dana pembangunan Aceh ini dari otsus, jangan-jangan Aceh ini bisa mundur ke tahun 1978 kalau enggak ada otsus,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah mengatakan, kesuksesan yang ada saat ini bagi Pemprov Aceh dalam mengelola dana Otsus yang dapat mengembalikan angka kemiskinan pada titik 15

persen setelah tahun 2002. Tentu ke depannya ini bisa menjadi pertimbangan bagi Aceh, agar dana Otsus bagi Aceh dapat terus berlanjut.

“Ke depan kita akan mencoba lebih fokus lagi soal pelaksanaan otsus, dengan situasi sudah mulai stabil kita akan bergerak pada fokus-fokus lain. Kita mencoba mengikuti kesuksesan penggunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Mungkin akan kami coba kombinasi, sehingga otsus bisa mengikuti cara kerjanya,” kata Taqwallah.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Provinsi Aceh ini diantaranya Wakil Ketua BAKN Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan) dan Ahmad Syaikh (F-PKS), serta Anggota BAKN Bachrudin Nasori (F-PKB). ■ ndy/es

Anak Panti Asuhan Miliki Hak yang Sama untuk Mengenyam Pendidikan



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Panti Asuhan Ummul Iman di Gorontalo. Foto: Erman/HR

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, tak terkecuali bagi anak-anak yang berada di panti asuhan. Di mana, anak-anak panti asuhan memiliki hak yang sama dengan anak lainnya terutama dalam mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Panti Asuhan Ummul Iman di Limboto, Gorontalo, Minggu (24/11). Ia juga mengapresiasi kehadiran dan partisipasi masyarakat sipil Gorontalo

untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang berada di panti asuhan.

“Komisi VIII DPR RI senantiasa mendorong agar kebijakan terkait kesejahteraan sosial selalu berpihak kepada kelompok yang membutuhkan. Seperti anak-anak, fakir miskin juga lansia kesemuanya itu harus dilindungi oleh negara. Terutama anak-anak panti, mereka harus mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan di sekolah,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Semua anak-anak yang berada di panti asuhan, lanjut Ace, harus sudah mendapatkan manfaat dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tengah digalakkan pemerintah. Pun ketika menimba ilmu di bangku sekolah, harusnya anak-anak tersebut

(yang berada di panti asuhan) sudah mendapatkan kebebasan biaya alias gratis.

Di samping itu, Ace mengungkapkan bahwasanya Komisi VIII DPR RI mencoba mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia). Dengan alasan mereka yang sudah berusia lanjut juga memiliki kesamaan hak tetap produktif. “Ada yang namanya lansia potensial, mereka harus didorong untuk tetap produktif dan berusaha,” ucap Ace.

Politisi dapil Jawa Barat II ini mendorong panti asuhan, panti sosial juga panti binaan agar memiliki kejelasan status di mata hukum dan juga kejelasan anggaran agar bisa di-support oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, bahkan Pemerintah Pusat. ■ es

Pelatihan BLK Banyuwangi Harus Sesuai Kebutuhan Industri

Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir terus menggenjot potensi pariwisatanya. Sektor pertanian dan perikanan pun tak kalah pentingnya bagi masyarakat Banyuwangi. Untuk itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari masyarakat Banyuwangi yang mumpuni guna memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi yang dibina Kementerian Ketenagakerjaan RI, diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan dan menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan industri.

“Potensi Banyuwangi bukan hanya pariwisata, juga dengan pengolahan hasil pertanian. Kami ingin agar BLK Banyuwangi ini melihat apa-apa yang perlu dibuat pelatihan. Dan betul-betul tidak sekedar pelatihan, tapi juga disalurkan kepada sektor pariwisata, maupun sektor pertanian. Kita harus buat pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Banyuwangi,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke BLK Banyuwangi, Jatim, Jumat (22/11).

Felly menambahkan, BLK Banyuwangi bukan hanya menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat Banyuwangi semata, namun juga harus melihat penyaluran SDM hasil pelatihan kepada industri dan pasar yang membutuhkan. Politisi Partai NasDem ini juga meminta kepada BLK Banyuwangi yang baru beroperasi sekitar dua bulan ini untuk bersinergi dengan Pemkab Banyuwangi serta para pelaku industri di Banyuwangi, sehingga bisa maksimal dalam menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan pasar.

“Sebagai BLK yang baru, tentu kami meminta kepada pengurus BLK untuk melihat sekeliling kita. Misalkan, kalau kita lihat Bali dekat dari sini (Banyuwangi), kunjunganlah ke sana. BLK apa yang sudah ada di sana, misalnya pariwisata. Karena potensi di sini (Banyuwangi) kan pariwisata. Jadi kita lihat yang sudah ada. Kenapa harus malu kalau kita tiru yang sudah ada. Dan memang itu jadi kebutuhan masyarakat di Banyuwangi dan tentunya kebutuhan untuk wisatawan,” saran legislator dapil Sulawesi Utara itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai, dengan potensi pariwisata Banyuwangi yang sedang digalakkan dalam 10 tahun terakhir, hal ini harus ditangkap BLK Banyuwangi untuk menyiapkan kebutuhan tenaga kerja. Sebagai legislator dapil Jatim III yang

juga meliputi Banyuwangi, ia tidak mau perkembangan pariwisata dan perhotelan yang luar biasa, tidak diimbangi oleh masyarakat yang punya *skill* dalam bidang perhotelan. Ia menekankan pentingnya pelatihan perhotelan dan pariwisata dilakukan oleh BLK.

“Jangan sampai masyarakat Banyuwangi hanya sebagai penonton pada perkembangan pariwisata di Banyuwangi, tanpa bisa menikmati atau turut andil bagian sebagai tenaga kerja di sektor itu. Nah, ini yang saya pikir luar biasa. Karena Banyuwangi menjadi salah satu dari sekian daerah yang memiliki BLK yang dibina langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan. BLK Banyuwangi ini cukup besar. Dan oleh sebab itu masyarakat Banyuwangi harus memanfaatkan BLK ini,” pesan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. ■ sf



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene (pertama dari kiri) memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI meninjau sarana dan prasarana BLK Banyuwangi. Foto: Sofyan/HR

Potensi Obyek Wisata Likupang Sangat Menjanjikan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi (tengah). Foto: Depi/HR

Obyek wisata Likupang merupakan sebuah kawasan wisata di Provinsi Sulawesi Utara yang banyak menawarkan potensi wisata bahari. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Destinasi Super Prioritas selain Danau Toba, Labuhan Bajo, Mandalika, dan Candi Borobudur.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulut mengatakan, panorama alam Likupang sangat potensial dan memiliki nilai jual yang tinggi sebagai destinasi wisata. Menurutnya, panorama pantai dan alam bawah lautnya sangat menjanjikan untuk bisa dinikmati para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Ketika berbicara soal destinasi super prioritas, maka kita ingin tahu

lebih jelas, apa yang dimaksud dengan super prioritas tersebut. Saat kami sudah meninjau langsung di lapangan, memang potensi itu ada. Namun konsep yang ditampilkan lebih banyak kepada milik swasta. Ada sekitar 400 hektar lebih yang akan dibangun oleh swasta,” ucap Dede usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Daerah dan mitra kerja terkait, di Pantai Pulisan, Likupang Timur, Sulut, Jumat (22/11).

Saat Tim Kunspek Komisi X DPR RI menuju lokasi, terlihat adanya pengerjaan pengembangan infrastruktur jalan menuju KEK Likupang. Penataan itu menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur pekerjaan umum pada destinasi wisata prioritas. “Memang potensinya ada, tetapi kami juga akan melihat bagaimana infrastruktur pendukung lainnya untuk menuju ke lokasi. Dan

ternyata Pemerintah telah menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar Rp 600 miliar untuk memperbaiki infrastruktur jalan menuju ke lokasi tersebut,” ujarnya.

Selain sisi infrastruktur, sambung Dede, ada hal lain yang perlu diperhatikan, seperti masalah sosial dan karakter masyarakat setempat. “Di sepanjang jalan itu tidak terlihat ada pembangunan yang signifikan. Jalannya masih alami, kanan kirinya masih terlihat ladang dan hutan. Memang butuh *effort* yang besar ketika Pemerintah sudah mencanangkan ini sebagai destinasi wisata super prioritas,” tandas Legislator Fraksi Partai Demokrat itu.

Dede menyampaikan, Pemerintah harus mampu menggaet lebih banyak lagi pihak swasta untuk mendukung program super prioritas tersebut. Oleh karenanya, tentu harus ada tawaran-tawaran yang menarik dari Pemerintah kepada pihak swasta agar mereka mau berinvestasi. “Ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Kita akan mendorong sebisa mungkin untuk terwujudnya ide dan gagasan ini, supaya tidak hanya sebatas perencanaan *masterplan* saja. Komisi X akan membahasnya lagi dengan Menteri Pariwisata,” tegasnya.

Saat ini, wisatawan mancanegara dari China masih mendominasi kunjungan wisata ke Sulut, yang notabene *spending* wisatanya rata-rata dengan *budget* murah. “Sementara yang diperlukan yang *budget* tinggi atau yang *spending*-nya 3 sampai 4 kali lipat lebih banyak dan lebih lama daripada turis-turis China. Harus ada *marketing plan*, *promotion*, sekolah kepariwisataan untuk pendidikan SDM, dan upaya mengelola kebudayaan agar lebih menarik,” saran legislator dapil Jawa Barat II itu. ■ dep/sf

Komisi X Dorong Koordinasi Pengembangan Wisata Borobudur

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti sulitnya sinkronisasi serta koordinasi Badan Otoritas Borobudur (BOB), dan Badan Pengelola yang belum terbentuk berakibat pada kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Fikri menilai sinkronisasi dan koordinasi antara pihak terkait merupakan hal penting untuk mengembangkan wisata Borobudur.

Hal itu diungkapkan Fikri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Kawasan Pariwisata Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/11). Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data faktual dan penjelasan dari Pemda, BOB, serta seluruh *stakeholder* terkait pengembangan pariwisata di Jawa Tengah khususnya Kawasan Pariwisata Borobudur.



DENGAN ADANYA SINKRONISASI DAN KOORDINASI, DIHARAPKAN KAWASAN BOROBUDUR DAPAT MEMBERI KEMANFAATAN DARI SISI EKONOMI BAGI MASYARAKAT SEKITAR



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Filu/HR

Dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi, diharapkan Kawasan Borobudur dapat memberi kemanfaatan dari sisi ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Khusus di Borobudur ini ternyata koordinasi dan sinkronisasi *real* ini agak susah. Ada Badan Otorita Borobudur, kemudian ada badan pengelola yang belum terbentuk juga sampai sekarang. Sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat belum merasa terlibat,” ungkap Fikri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini turut memaparkan mengenai persoalan konservasi Borobudur, dimana selain sebagai objek wisata, Kawasan Borobudur juga merupakan kawasan cagar budaya.

Fikri menjelaskan, seluruh pihak terkait, baik Pemerintah maupun para *stakeholder* harus memikirkan adanya solusi konkret terkait dampak kerusakan situs Candi Borobudur sebagai akibat banyaknya wisatawan yang datang berkunjung.

Terkait hal itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX tersebut mendorong agar pengembangan destinasi wisata Borobudur periode saat ini dapat lebih baik dari periode sebelumnya, baik dari sisi pengelolaan maupun konservasi. Mengingat, Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi pariwisata nasional dan mancanegara yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata budaya berkelanjutan. ■ *srw/sf*

Pengesahan UU Harus Mencerminkan Aspirasi Masyarakat

Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam mengatakan pentingnya menyerap aspirasi dari berbagai kalangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), agar Undang-Undang (UU) yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Kami terus mencari masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020, agar setiap RUU yang ditetapkan menjadi Undang-Undang senantiasa mencerminkan kebutuhan hukum kepada masyarakat,” ungkapnya saat memimpin pertemuan tim kunspek Baleg DPR RI dengan jajaran Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY), DPRD DIY, Organisasi Masyarakat, Civitas Akademika, LSM serta Tokoh Masyarakat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, DIY, Kamis (21/11).

Selain itu, pihaknya juga melakukan dialog terkait *omnibus law* yang membutuhkan pemetaan lebih dalam atas semua regulasi yang ingin diintegrasikan ke dalam satu rumusan UU. “Baleg membutuhkan masukan soal merumuskan *Omnibus Law*. Kami ingin mendapatkan pandangan dari ahli tentang ini. Mereka menanyakan terkait RUU Koperasi, apakah akan diundangkan atau diintegrasikan dalam konsep *omnibus law*, nah seperti ini yang akan kami bahas DPR” tuturnya.

Legislatur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan, Baleg terbuka menerima masukan dari

”

BALEG MEMBUTUHKAN MASUKAN SOAL MERUMUSKAN OMNIBUS LAW. KAMI INGIN Mendapatkan Pandangan dari Ahli TENTANG INI

masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR RI, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur DIY Pangeran Paku Alam menyampaikan penyerapan aspirasi dari semua kalangan dalam rangka penyusunan legislasi nasional tahun 2020-2024 merupakan hal yang penting. “Aspirasi ini kami harapkan tidak hanya menjadi catatan saja, tetapi hendaknya dipahami dengan baik, agar terakumulasi,” tuturnya.

Turut hadir dalam kunjungan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya serta beberapa anggota Baleg DPR lainnya; seperti Vita Ervina dan Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan), Gandung Pardiman dan Alien Mus (F-Golkar), Taufik Basari (F-Nasdem), Farida Hidayat (F-PKB), Bambang Purwanto (F-Demokrat), KH. Bukhori (F- PKS) dan Yandri Susanto (F-PAN). ■ rmm/es



Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam (kiri). Foto: Ria/HR

Sosialisasi Tupoksi MKD Harus Terus Dilakukan

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa sosialisasi tugas pokok dan fungsi MKD serta pelaksanaan kode etik DPR RI ke berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum harus terus dilakukan. Pasalnya, tidak sedikit penyimpangan yang dilakukan oleh Anggota DPR RI, yang bersentuhan dengan tugas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan.

“Ini untuk kedua kalinya MKD, setelah sebelumnya ke Jawa Timur menggelar sosialisasi terkait MKD, apa saja tupoksi dari MKD ini. Kenapa kita memilih ke aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan selain ke DPRD, Pemprov dan Pemda? Karena, jika ada penyimpangan dari anggota dewan yang berjumlah 575 orang ini pasti banyak bersentuhan dengan institusi kepolisian dan kejaksaan,” ujar Trimedya usai memimpin sosialisasi MKD dengan Kapolda dan Kepala

”

BARU-BARU INI KAMI, MKD SEPAKAT UNTUK MENERAPKAN TATA TERTIB BARU, DI MANA SETIAP PARIPURNA, ANGGOTA DPR RI HARUS MEMAKAI SETELAN JAS LENGKAP



Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Trimedya Panjaitan (tengah). Foto: Ayu/HR

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, di DIY, Kamis (21/11).

Pihaknya juga menjangkir aspirasi dan masukan dari institusi penegak hukum tentang perbaikan tata beracara MKD, serta apa saja yang harus ditertibkan di DPR RI, sebelum digelar konsinyering ke depan. Penegakan kode etik DPR RI sejatinya untuk menjaga marwah dan martabat DPR RI sebagai sebuah lembaga tinggi negara. Oleh karenanya, bagi pelanggar etik, MKD telah menetapkan sejumlah sanksi, dari sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang dan sanksi berat berupa rekomendasi pemecatan anggota dewan.

“Baru-baru ini kami, MKD sepakat untuk menerapkan tata tertib baru, di mana setiap Paripurna, Anggota DPR RI harus memakai setelan jas lengkap. Jika selama ini saat paripurna dimungkinkan memakai batik, tahun depan akan kami tertibkan dengan

penggunaan jas, biar terlihat lebih berwibawa. Namun sebelum hal itu diterapkan dan menjadi sebuah keputusan, kami tentu akan diskusikan terlebih dahulu dengan Pimpinan DPR RI serta Ketua Fraksi-Fraksi yang ada di DPR tentang hal ini,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan Trimedya, tidak hanya terkait dengan pemakaian setelan jas lengkap, MKD juga akan menertibkan absensi anggota DPR RI sebanyak 40 persen. Dalam hal ini petugas MKD akan terus memonitor absensi Anggota DPR RI. Pasalnya, tidak jarang dalam beberapa sidang, ruang rapat terlihat kosong. Ia berharap dengan ditertibkannya kode etik DPR RI tersebut, tidak hanya marwah dan martabat DPR RI yang tetap terjaga, namun DPR RI sendiri pun dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. ■ ayu/es

DPR Komitmen Perkuat Hubungan Kerja Sama Indonesia-Ukraina

Penguatan kerja sama bilateral menjadi pokok bahasan dalam pertemuan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil. Dalam pertemuan tersebut sejumlah isu menjadi pokok bahasan, diantaranya rencana kerja sama di bidang pertahanan, hingga pengajuan bebas Visa bagi warga Indonesia yang akan berkunjung ke Ukraina.

“Beberapa isu yang diangkat adalah tentang Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia dengan Ukraina. Dubes juga menyampaikan harapan agar rencana mereka, pengajuan dari Parlemen Ukraina tentang hubungan kerja sama di bidang pertahanan bisa diratifikasi oleh DPR kita. Saya juga baru mendapatkan informasi itu dan tentu kita akan cek,” ungkap Fadli usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Intensitas hubungan kerja sama antara Indonesia-Ukraina juga dinilai politisi Partai Gerindra ini semakin menguat, mengingat cukup banyaknya delegasi DPR RI yang berkunjung ke Ukraina sepanjang tiga tahun terakhir. Terlebih, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina Yuddy Chrisnandi, juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan pada periode 2004-2019 lalu. Ini berdampak pada cukup banyaknya interaksi antar kedua negara itu.

Dalam pertemuan itu, Fadli juga mendorong adanya bebas Visa bagi warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Ukraina. Hal ini diperlukan mengingat Indonesia telah memberikan bebas bisa bagi Ukraina. “Mudah-mudahan dengan begitu, interaksi antara orang per orang atau *people to people contact* akan



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerima Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil. Foto: Arief/HR

mempercepat hubungan perdagangan, hubungan ekonomi, yang menurut saya penting bagi kerja sama antara kedua negara,” tandas Anggota Komisi I DPR RI itu.

Hubungan kerja sama Indonesia-Ukraina sudah terbentuk sejak 1996 berdasarkan sejumlah perjanjian sektor perekonomian, perdagangan, dan investasi. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Negara Ukraina, omset perdagangan bilateral antar kedua negara pada tahun 2017 sudah mencapai 658 juta dollar AS, dengan nilai ekspor mencapai 397,4 juta dollar AS dan nilai impor yang mencapai 260,6 juta dollar AS.

Adapun komoditas ekspor

Indonesia ke Ukraina, diantaranya berupa kelapa sawit, gandum, dan hasil pertanian lainnya. Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) ini juga mengatakan bahwa peluang kerja sama pada sektor lainnya dapat memperkuat hubungan kedua negara.

“Terkait dengan hubungan Indonesia-Ukraina, sudah cukup banyak yang dilakukan selain bidang pertahanan, juga pada bidang pendidikan, bahkan pada bidang kesehatan, Ukraina dinilai cukup maju dalam teknologi *stem cell*. Itu yang diharapkan kita bisa lebih memperkuat hubungan negara pada bidang-bidang tersebut,” tutup Fadli. ■ atw/sf

HUT ke-48 Korpri, Setjen dan BK DPR Gelar Senam Bersama dan Lomba Tarik Tambang

Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dan Dewan Pengurus Korpri Setjen dan BK DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), menyelenggarakan berbagai kegiatan, salah satunya acara senam bersama dilanjutkan lomba tarik tambang antar pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, dalam memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan secara rutin, para pegawai harus tetap menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Rutinitas bekerja yang sangat bergantung dengan produk-produk

politik ini menjadi tidak kenal waktu.

“Saya anjurkan kepada teman-teman untuk memperhatikan juga aspek kesehatan, paling tidak setiap hari Jumat ikut senam pagi bersama. Saya sudah sampaikan dalam beberapa hari ini, beberapa teman kami yang karena kesehatannya kurang memadai dan sudah mendahului kita. Saya ingin teman-teman memiliki kepedulian untuk menjaga kesehatan,” katanya usai membuka acara senam bersama dan lomba tarik tambang, di lapangan sepak bola, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

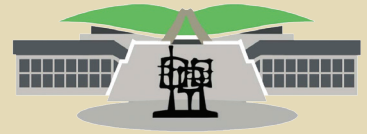
Terkait perlombaan tarik tambang, Indra mengatakan perlombaan ini dapat mengutamakan nilai gotong royong dan kekompakan. Di mana kedua nilai

tersebut dibutuhkan dalam kinerja sehari-hari yang mengharuskan adanya sinergi antar bagian untuk meminimalisir ego sektoral yang ada. Tarik tambang menurutnya cukup menghibur dan semua orang bisa mengikuti perlombaan tanpa perlu memiliki keahlian khusus.

Pada peringatan HUT ke-48 Korpri ini, Indra berharap agar seluruh pegawai senantiasa berinovasi dengan mengikuti tren di era industri 4.0 saat ini. “Saya selalu ingatkan kepada teman-teman di Korpri untuk siap menghadapi perubahan ini. Mengantisipasi perubahan ini kepada pegawai baru juga saya ingatkan. Cuma ada pilihan inovasi atau mati. Jadi kalau kita tidak mau berubah, ya kita ‘mati’,” tegasnya. ■ ndy/es



Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan Irtama DPR RI Setyanta Nugraha turut menghadiri HUT ke-48 Korpri Setjen dan BK DPR RI di Kompleks Parlemen. Foto: Azka/HR



Komisi XI DPR RI menggelar RDP dengan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk membahas evaluasi kinerja tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Arief/HR



Komisi X DPR RI menerima audiensi Paguyuban Suporter Timnas Indonesia terkait penganiayaan dan penahanan suporter Timnas Indonesia oleh Malaysia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11). Foto: Mentari/HR



Baleg DPR RI menyerap masukan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengenai revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/11). Foto: Jaka/HR

